

Analisis Kebijakan Penggunaan APBD terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya

Jesica Arizona

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, Indonesia

Email: jesica.arizona11@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
APBD, realisasi belanja, capaian kinerja, kesejahteraan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen utama pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, realitas di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya realisasi belanja APBD dan capaian kinerja pembangunan makro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan APBD terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya serta merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen APBD, Laporan Kinerja (LKjIP), dan data makro BPS; wawancara mendalam dengan pejabat di Bappelitbangda dan BPKAD; serta observasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara integratif untuk mengevaluasi keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun realisasi belanja APBD konsisten tinggi (rata-rata di atas 96%), dampaknya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan kemiskinan, dan pengangguran belum optimal. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh dominasi belanja operasi (>91%), lemahnya penerapan penganggaran berbasis kinerja, dan evaluasi yang masih berfokus pada aspek administratif ketimbang substansi hasil (<i>outcome</i>). Disimpulkan bahwa efektivitas APBD Kota Tasikmalaya dalam mendorong kinerja pembangunan masih belum optimal. Sebagai rekomendasi kebijakan utama, penelitian ini mengusulkan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang didukung oleh digitalisasi sistem pengelolaan APBD dan penguatan monitoring dan evaluasi yang substantif. Rekomendasi ini dirancang untuk diimplementasikan melalui Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran teknis, sehingga dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Keywords: APBD, expenditure realization, performance achievements, welfare	Abstract <i>The Regional Revenue and Expenditure Budget is the main instrument of local governments to achieve development goals. However, the reality in Tasikmalaya City shows that there is a gap between the high realization of APBD spending and the achievement of macro development performance. This study aims to analyze the effectiveness of the use of the APBD on the performance achievements of the Tasikmalaya City Government and formulate recommendations for its improvement policies. This study uses a qualitative method with an analytical descriptive approach. Data was collected through a documentation study of APBD documents, Performance Reports (LKjIP), and BPS macro data; in-depth interviews with officials at</i>
--	--

Bappelitbangda and BPKAD; and field observations. The collected data was analyzed integratively to evaluate the relationship between budget realization and the achievement of performance indicators. The results of the study revealed that although the realization of APBD expenditure is consistently high (on average above 96%), its impact on increasing the Human Development Index, reducing poverty, and unemployment is not optimal. This imbalance is caused by the dominance of operating expenditure (>91%), the weak implementation of performance-based budgeting, and evaluations that still focus on administrative aspects rather than the substance of outcomes. It was concluded that the effectiveness of the Tasikmalaya City Budget in encouraging development performance is still not optimal. As a key policy recommendation, this study proposes the implementation of performance-based budgeting supported by the digitization of the APBD management system and the strengthening of substantive monitoring and evaluation. This recommendation is designed to be implemented through the Mayor's Regulation and technical Circular, so as to ensure that every rupiah of the budget has a real impact on improving the welfare of the people of Tasikmalaya City.



PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hanifa, 2021; Putri Intan Permata Sari et al., 2022; Ramadhan & M, 2022; Sahrudin, 2020; Santoso et al., 2023). APBD Kota Tasikmalaya setiap tahunnya terus mengalami perkembangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Namun, dinamika realisasi anggaran sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan capaian aktual (Pemerintah Kota Tasikmalaya, 2024a). Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini menunjukkan adanya peningkatan hasil kinerja setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan besarnya penggunaan APBD (Krisniawati, 2021; Susanto, 2019; Syukri & Hinaya, 2019; Tiyas & Wuryani, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penggunaan APBD telah efektif dalam mendorong pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah (Katadata Insight Center, 2020).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji efektivitas anggaran publik. Misalnya, penelitian Sitepu et al. (2024) mengidentifikasi determinan penghambat penyerapan anggaran di Provinsi Riau, sementara Katadata Insight Center (2020) mengembangkan indeks kelola untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD. Studi-studi tersebut umumnya berfokus pada aspek penyerapan anggaran dan efisiensi, namun masih terbatas dalam mengaitkan secara langsung realisasi fiskal dengan capaian indikator kinerja makro daerah secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan analisis kebijakan berbasis data fiskal dan indikator makro daerah untuk mengevaluasi efektivitas APBD.

Masyarakat menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya agar dapat menciptakan Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dengan mendahulukan kepentingan Masyarakat, serta bersih dari korupsi demi mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Adanya tuntutan tersebut karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh Masyarakat di Kota Tasikmalaya yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, masalah sampah, keberadaan anak jalanan yang mengganggu ketertiban, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan publik dan layanan sosial seperti bansos. Terdapat dinamika sosial yang cukup tinggi terlihat dari banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir tahun 2024.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung pelaksanaan pembangunan, mencapai tujuan fiskal, mendorong efisiensi, dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas keuangan Daerah agar tercapai kesejahteraan Masyarakat. Efektivitas penggunaan APBD akan sangat menentukan kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Daerah. Melalui APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai program prioritas pembangunan Daerah yaitu program pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat miskin, program kualitas SDM yang berdaya saing, program pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, program infrastruktur perkotaan dan permukiman, program penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta program percepatan implementasi reformasi birokrasi (Peraturan Walikota Tasikmalaya, 2023).

Porsi belanja dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2024 masih didominasi oleh belanja operasi, sementara belanja modal yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang relatif kecil. Penggunaan APBD tahun anggaran 2024 untuk belanja operasi sebesar 91,336% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 44,466%, belanja barang dan jasa sebesar 41,297%, belanja bunga sebesar 0,016%, belanja subsidi sebesar 0,021%, belanja hibah sebesar 5,454% dan belanja bantuan sosial sebesar 0,082% sedangkan belanja modal sebesar 8,539% yang terdiri dari belanja modal tanah sebesar 0,215%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 4,075%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 1,776%, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 2,439%, belanja modal aset tetap lainnya sebesar 0,032%, belanja modal aset lainnya yaitu sebesar 0,003%, serta belanja tidak terduga sebesar 0,124% (Peraturan Walikota Tasikmalaya, 2024).

Penggunaan APBD untuk belanja modal sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, dan menciptakan lapangan kerja, serta berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan perencanaan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 masih menghadapi sejumlah permasalahan diantaranya yaitu inefisiensi dan inefektivitas belanja pada program dan kegiatan, terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan, dan anggaran tidak terserap sepenuhnya (Sitepu et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting dilakukan analisis kebijakan penggunaan APBD terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD dalam mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

berupa evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga mampu mengidentifikasi secara tepat berbagai hambatan dan tantangan dalam pemanfaatan APBD. Lebih lanjut, temuan dari studi ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tataran yang lebih luas, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah di hadapan masyarakat, sekaligus menyediakan dasar empiris dan rekomendasi kebijakan yang strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran yang lebih berorientasi pada hasil dan kinerja. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah penyusunan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penggunaan APBD agar lebih berorientasi pada kinerja pembangunan Daerah, yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran teknis sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan dan mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis kebijakan penggunaan APBD terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen APBD, Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, data BPS, serta dokumen publikasi resmi lainnya untuk memperoleh gambaran alokasi anggaran dan capaian kinerja. Wawancara mendalam dengan narasumber kunci, antara lain pejabat pada Bappelitbangda dan BPKAD Kota Tasikmalaya untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, implementasi, serta kendala dalam penggunaan APBD. Observasi lapangan terhadap program yang didanai APBD untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengkombinasikan hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan data statistik guna memperoleh kesimpulan yang valid, objektif, dan komprehensif. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mengeksplorasi dan menjelaskan sebuah kasus atau situasi sosial dengan mengandalkan data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2024 diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Perangkat Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dan memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan pembangunan Daerah. Penentuan program prioritas pembangunan Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kota Tasikmalaya, keberhasilan program tersebut secara langsung akan meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah. Program prioritas menentukan arah penggunaan sumber daya yang terfokus untuk mencapai target pembangunan, yang kemudian dinilai melalui indikator kinerja (Pemerintah Kota Tasikmalaya, 2023; 2024b).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dari hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini menggambarkan sejauh mana visi dan misi serta tujuan dan sasaran Daerah telah tercapai, baik secara makro maupun urusan spesifik Pemerintahan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional. Capaian IKK Makro Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu sebagai berikut (Pemerintah Kota Tasikmalaya, 2024d):

Tabel 1 Capaian IKK Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Sampai Dengan 2024

No.	IKK Makro	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,04	74,31	74,84	75,47	76,03
2	Angka Kemiskinan	12,97	13,13	12,72	11,53	11,1
3	Angka Pengangguran	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,01	3,57	5,01	5,96	5,22
5	PDRB Per-Kapita	30.223,19 (Ribu Rupiah)	31.592,01 (Ribu Rupiah)	34.095,87 (Ribu Rupiah)	36.954,58 (Ribu Rupiah)	39.445,45 (Ribu Rupiah)
6	Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini	0,366	0,414	0,405	0,428	0,359

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 2 Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan 2024

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	
		Rp.	%
1	2020	1.741.914.901.560,00	97,33
2	2021	2.013.489.962.619,00	96,97
3	2022	1.912.313.365.226,68	95,45
4	2023	1.716.186.584.365,56	97,48
5	2024	1.790.597.242.391,64	96,40

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya terus mengalami kemajuan. Status pembangunan manusia Kota Tasikmalaya sudah berada di level “tinggi”. Kota Tasikmalaya lebih baik dari rata-rata Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat yaitu 74,68. IPM Kota Tasikmalaya meningkat dari 75,47 tahun 2023 menjadi 76,03 tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya yang seluruhnya meningkat di tahun 2024. Namun pertumbuhan IPM tahun 2024 sedikit mengalami perlambatan, begitu pula dengan dimensi penyusunnya yang hampir seluruhnya mengalami perlambatan pertumbuhan.

Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya, posisi Kota Tasikmalaya masih tergolong “bermasalah” jika dibandingkan dengan kondisi Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya tahun 2024 disebut sebagai “kota termiskin ketiga” di Jawa Barat, setelah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan.

Rata-rata kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat adalah 8,01%. Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya 11,10% melebihi rata-rata, hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial di Kota Tasikmalaya. Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha.

Terjadi penurunan angka pengangguran di Kota Tasikmalaya tahun 2024, penurunan dari 6,55% menjadi 6,49% menunjukkan adanya kemajuan, namun perubahan kecil menandakan bahwa tantangan mendasar belum terselesaikan. Untuk menurunkan pengangguran secara signifikan, intervensi struktural dibutuhkan. Kota Tasikmalaya menghadapi tekanan kompetisi antara jumlah pencari kerja dengan kemampuan penyerapan pasar kerja Kota. Meskipun Kota Tasikmalaya sedikit “lebih baik” dari rata-rata Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat yaitu 6,52%, namun tidak cukup jauh untuk menyatakan keberhasilan karena masih jauh di atas tingkat pengangguran nasional. Ini menandakan bahwa masalah pengangguran di Kota lebih kompleks dibanding di tingkat Provinsi atau Nasional. Bila laju penurunan terlalu lambat, Kota Tasikmalaya mungkin akan berada dalam status “pengangguran tinggi berkepanjangan”, yang berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 5,22 termasuk positif dan di atas rata-rata Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat yaitu 4,997. Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa sebagian dari pertumbuhan mungkin berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kota Tasikmalaya berhasil menaikkan PDRB Per-Kapita dari 36.954,58 (Ribu Rupiah) ke 39.445,45 (Ribu Rupiah) tahun 2024, posisi tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat yaitu 53.108,16 (Ribu Rupiah). Namun, data ekonomi menunjukkan bahwa untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ada beberapa daerah dengan nilai PDRB Per-Kapitanya jauh lebih tinggi yaitu daerah dengan aktivitas industri, investasi, atau sektor produktif tinggi, misalnya Kota/Kabupaten dengan basis industri berat atau pusat ekonomi di Jawa Barat sering menempati urutan lebih tinggi dalam daftar PDRB Per-Kapita. Untuk mengejar rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan teknologi.

Penurunan ketimpangan pendapatan/indeks gini dari tahun 2023 yaitu 0,428 ke tahun 2024 yaitu 0,359 menandakan distribusi pendapatan antar penduduk menjadi lebih merata. Indeks gini Kota Tasikmalaya tahun 2024 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat yaitu 0,372. Meskipun terjadi penurunan, ketimpangan tetap ada sehingga tetap diperlukan upaya untuk menjaga tren agar tidak kembali melebar.

Data capaian IKK makro menunjukkan adanya peningkatan hasil kinerja sampai dengan tahun 2024, namun capaian tersebut tidak sebanding dengan besarnya penggunaan APBD, dimana realisasi belanja APBD tahun anggaran 2024 sebesar 96,40% atau senilai Rp.1.790.597.242.391,64 dengan efisiensi belanja sebesar 3,60% atau senilai Rp.66.908.700.147,36. Realisasi belanja APBD sebesar 96,40% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kinerja yang baik dalam hal penyerapan anggaran, tingginya realisasi belanja menandakan administrasi keuangan Daerah sudah berjalan relatif disiplin dan sesuai dengan target penyaluran dana namun capaian kinerja yang dihasilkan belum optimal (BPS Provinsi Jawa Barat, 2025).

Ketidakeimbangan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja menunjukkan bahwa belanja Daerah belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pembangunan dan pelayanan

publik. Dengan demikian, diperlukan transformasi dalam tata kelola APBD agar tidak hanya fokus pada tinggi rendahnya penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target kinerja dan kesejahteraan Masyarakat.

Adanya efisiensi belanja sebesar 3,60% mencerminkan bahwa tidak seluruh anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mencapai target kinerja. Efisiensi ini pada satu sisi dapat dipandang sebagai indikator positif karena menunjukkan adanya penghematan dalam pelaksanaan program, seperti melalui proses pengadaan barang dan jasa yang lebih kompetitif atau pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil menghindari pemborosan sekaligus menjaga disiplin fiskal. Dalam konteks *value for money*, efisiensi yang ideal bukan hanya sekadar penghematan, tetapi harus tetap menjamin tercapainya efektivitas dan manfaat program bagi Masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBD ke depan perlu diarahkan untuk menyeimbangkan antara efisiensi keuangan dengan efektivitas capaian kinerja, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya hemat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pembangunan Daerah.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2024 belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara realisasi belanja dengan capaian hasil pembangunan. Belum optimalnya efektivitas APBD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal diantaranya yaitu kapasitas SDM, lemahnya penerapan anggaran berbasis kinerja, dan budaya birokrasi yang masih *input oriented*. Faktor eksternal diantaranya yaitu *intervensi* politik dalam penentuan alokasi anggaran serta minimnya partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas belanja publik (Pemerintah Kota Tasikmalaya, 2024).

Komposisi APBD memperlihatkan dominasi belanja operasi dibanding belanja modal. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Distribusi anggaran antar sektor juga belum sepenuhnya proporsional, sektor pendidikan dan kesehatan relatif besar, namun efektivitasnya terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia belum optimal (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Perencanaan anggaran pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD dan RKPD Kota Tasikmalaya. Beberapa program strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai, sementara kegiatan rutin justru masih menyerap porsi anggaran yang besar. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya konsistensi kebijakan dengan target capaian kinerja Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan cenderung menekankan pada pencapaian serapan anggaran dibandingkan pencapaian *outcome*. Walaupun realisasi belanja menunjukkan persentase serapan tinggi, hal tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan indikator kinerja Daerah. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara input anggaran dengan hasil nyata yang diterima Masyarakat.

Pengawasan pelaksanaan APBD masih memiliki kelemahan. Evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah lebih banyak menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan analisis manfaat (*benefit*) bagi Masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan. Akibatnya, masukan untuk perbaikan kebijakan seringkali kurang tepat sasaran. Lemahnya koordinasi lintas *sector* sehingga mengurangi efektivitas penggunaan APBD karena anggaran tidak diarahkan pada pencapaian target pembangunan lintas bidang yang saling mendukung. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penggunaan APBD dan kaitannya dengan capaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat realisasi

belanja relatif tinggi, capaian kinerja belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara serapan anggaran dan hasil pembangunan yang dirasakan Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah agar APBD tidak hanya menjadi instrumen penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjadi alat strategis untuk mencapai target pembangunan Daerah. Perumusan kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis efektivitas dan efisiensi.

Alternatif Kebijakan

Alternatif Pertama adalah Penganggaran Berbasis Kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja dan sasaran merupakan bagian dari sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. Program dan kegiatan disusun berdasarkan RPJMD dan RKPD Kota Tasikmalaya serta Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Dalam pengalokasian anggaran, prinsip efektif, efisien, dan ekonomis harus diterapkan untuk setiap Perangkat Daerah.

Alternatif Kedua adalah Penguatan Monitoring dan Evaluasi Substantif. Penguatan monitoring dan evaluasi substantif adalah proses sistematis untuk memastikan program, kegiatan atau kebijakan berjalan sesuai tujuan, menghasilkan dampak yang diharapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. Penguatan ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja melalui indikator yang terukur, pengumpulan dan analisis data secara berkala, serta pemberian umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta memastikan program memberikan dampak positif yang signifikan.

Alternatif Ketiga adalah Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan APBD. Perluasan penggunaan *e-planning*, *e-budgeting*, dan *dashboard* kinerja berbasis digital akan mendukung transparansi, mempercepat proses evaluasi, dan meningkatkan partisipasi publik. Digitalisasi dan transparansi pengelolaan APBD bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan Daerah kepada publik melalui sistem digital untuk mendorong akuntabilitas dan efisiensi, serta mencegah korupsi. Langkah ini meliputi otomatisasi proses, penyediaan data anggaran melalui website atau aplikasi, dan pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* untuk pencatatan data yang aman dan *real-time*.

Dalam menganalisis prioritas dari ketiga alternatif kebijakan di atas, telah dilakukan penilaian skoring 1-5 oleh pegawai di lingkungan Bappelitbangda dan BPKAD Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, implementabilitas, dan dampak terhadap kinerja.

Tabel 3 Skoring Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
	Penganggaran Berbasis Kinerja	Penguatan Monitoring dan Evaluasi Substantif	Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan APBD
Efektivitas	5	4	4
Efisiensi	4	4	5
Implementabilitas	4	3	3

Kriteria	Alternatif 1 Penganggaran Berbasis Kinerja	Alternatif 2 Penguatan Monitoring dan Evaluasi Substantif	Alternatif 3 Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan APBD
Dampak Terhadap Kinerja	5	4	4
Total Skor	18	15	16

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis skoring di atas, Penganggaran Berbasis Kinerja adalah alternatif kebijakan dengan skor tertinggi. Alternatif ini paling unggul karena dinilai sangat efektif (fokus pada *outcome*) dan memberi dampak signifikan pada capaian kinerja Daerah. Implementabilitasnya juga relatif tinggi karena prinsip *performance-based budgeting* sudah mulai diperkenalkan di banyak Daerah. Alternatif kebijakan ini dapat memastikan APBD benar benar digunakan sesuai program prioritas pembangunan Daerah sehingga serapan tinggi juga diikuti kinerja yang lebih baik.

Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan APBD adalah alternatif kebijakan dengan skor peringkat kedua. Alternatif ini cukup kuat dari sisi efisiensi dan akuntabilitas karena memanfaatkan teknologi (*e-planning, e-budgeting, dashboard* kinerja). Namun implementabilitas masih jadi tantangan, terutama terkait kesiapan SDM dan infrastruktur digital di Daerah. Dengan dukungan teknologi, pengawasan anggaran bisa lebih cepat, transparan, dan mengurangi potensi penyimpangan.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi Substantif adalah alternatif kebijakan dengan skor peringkat ketiga. Alternatif ini penting untuk menggeser fokus evaluasi dari sekadar serapan anggaran menuju dampak nyata. Namun kelemahannya adalah butuh sistem informasi yang kuat dan konsistensi pelaporan antar Perangkat Daerah, sehingga implementasinya relatif lebih sulit.

Kesimpulan hasil analisis, alternatif kebijakan prioritas yaitu penganggaran berbasis kinerja dengan pendukung utama yaitu digitalisasi dan transparansi pengelolaan APBD untuk memperkuat efisiensi dan transparansi serta sebagai pendukung kedua agar perencanaan dan pelaksanaan bisa terukur hasilnya diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi substantif. Kombinasi ketiganya akan menghasilkan siklus kebijakan APBD yang lebih efektif (tepat sasaran), efisien (hemat biaya), transparan (akuntabel), dan berdampak nyata pada Masyarakat.

Dalam kerangka kerja implementasi selama 5 (lima) tahun, untuk *timeline* kegiatan Tahun ke-1 fokus pada penetapan regulasi teknis berupa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya/ SK Wali Kota Tasikmalaya tentang penganggaran berbasis kinerja, melakukan pemetaan program/kegiatan prioritas yang berorientasi *outcome*, penguatan kapasitas SDM Perangkat Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, penerapan penganggaran berbasis kinerja di beberapa Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, meningkatkan porsi belanja modal minimal 2–3% dari total APBD.

Tahun ke 2-3 yaitu mengimplementasikan sistem digital terintegrasi (*e-planning, e-budgeting, e-money*), penerapan monitoring dan evaluasi substantif yang menilai efektivitas dan efisiensi, bukan hanya serapan, mengoptimalkan partisipasi publik dan DPRD dalam proses pengawasan APBD, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan indikator kinerja terukur dalam pengajuan program, realisasi *output* dan *outcome* menjadi syarat pengajuan anggaran berikutnya, melibatkan Masyarakat dalam proses musrenbang berbasis kinerja.

Tahun ke 4-5 yaitu menerapkan penganggaran berbasis kinerja penuh menjadi budaya birokrasi Daerah, membangun *big data* keuangan dan kinerja sebagai *basis evidence-based policy*, belanja modal minimal 25–30% dari total APBD, capaian SAKIP meningkat ke kategori A, Peningkatan capaian indikator kinerja kunci makro Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB Per-Kapita, penurunan ketimpangan pendapatan/indeks gini. Tercapainya program prioritas pembangunan Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat miskin, Kualitas SDM yang berdaya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Infrastruktur perkotaan dan permukiman, penyelenggaraan pemilu dan PILKADA serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi.

KESIMPULAN

Realisasi anggaran cukup tinggi, yakni 96,40%, namun capaian kinerja masih relatif rendah di angka 71,83%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya serapan anggaran tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja. Dari sisi efektivitas, realisasi belanja belum sepenuhnya menghasilkan output dan outcome yang maksimal. Artinya, ada gap antara input (anggaran) dengan hasil (kinerja). Dari sisi efisiensi, tingkat efisiensi belanja 3,60% menandakan masih ada ruang untuk perbaikan dalam penggunaan sumber daya agar menghasilkan capaian yang lebih besar dengan biaya yang lebih kecil. Analisis skoring terhadap alternatif kebijakan menunjukkan alternatif pertama yaitu penganggaran berbasis kinerja adalah opsi terbaik, karena dinilai paling efektif dan berdampak signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah. Alternatif ketiga yaitu digitalisasi dan transparansi APBD mendukung peningkatan efisiensi serta akuntabilitas. Alternatif kedua yaitu penguatan monitoring dan evaluasi substantif berperan sebagai pelengkap untuk memastikan hasil pembangunan lebih terukur. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu APBD perlu diarahkan pada kebijakan berbasis kinerja, didukung sistem digital yang transparan, serta evaluasi substantif, agar realisasi belanja sejalan dengan peningkatan kinerja pembangunan Daerah. Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Penyusunan APBD Kota Tasikmalaya sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran program dan kegiatan agar sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya sehingga dapat mendukung dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan ini akan diturunkan dalam bentuk Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Jawa Barat. (2025). *Data capaian IKK makro Kota Tasikmalaya tahun 2020 sampai dengan 2024*. <https://jabar.bps.go.id/id/query-builder>
- Hanifa, L. (2021). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 648–663. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1571>

- Katadata Insight Center. (2020). *Indeks kelola 2020: Kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD*. <https://katadata.co.id/indekskelola2020>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*. Kemendagri.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 68–83. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2023). *Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024*.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024a). *Catatan atas laporan keuangan (CALK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2024*. <https://ppid.tasikmalayakota.go.id/catatan-atas-laporan-keuangan-calk-kota-tasikmalaya-tahun-anggaran-2024/>
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024b). *Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang RKPD tahun 2024*.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024c). *Ringkasan APBD tahun 2024*.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2024d). *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*. <https://tarapti.tasikmalayakota.go.id/public-display/display-makro/capaian-kinerja-pemda>
- Peraturan Walikota Tasikmalaya. (2023). *Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024*.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya. (2024). *Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302867/perwali-kota-tasikmalaya-no-9-tahun-2024>
- Ramadhan, M., & Abd. Jalil, M. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bener Meriah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v4i1.222>
- Sahrudin. (2020). Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pendidikan IPS*, 10(2), 142–152. <https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.404>
- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 91–109. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>
- Sari, P. I. P., Wijaya, R. A., Saputra, D., & Yudha, A. M. (2022). Efek ratchet dalam anggaran pendapatan dan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 88–96. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3644>
- Sitepu, D. R., Priyatno, T., Akbar, R., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2024). Determinan penghambat penyerapan anggaran: Studi empiris pada Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.509>

- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 113–128. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal kabupaten & kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 44–52. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 22–33. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p22-33>